

# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

Vol. 21, No. 3, September 2016

ISSN 0853-9316

- ANCAMAN ISIS/IS DI INDONESIA  
*oleh: Poltak Partogi Nainggolan*
- DILEMA KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA  
*oleh: Riyadi Santoso*
- PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT  
*oleh: Mohammad Mulyadi*
- PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN  
(Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi)  
*oleh: Ahmad Subhan*
- DAMPAK PARIWISATA TERHADAP LINGKUNGAN DI PULAU TIDUNG KEPULAUAN SERIBU  
*oleh: Khrisnamurti, Heryanti Utami, Rahmat Darmawan*



Diterbitkan oleh  
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan  
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



# *Kajian*

**Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan**

Vol. 21, No. 3, September 2016

ISSN 0853-9316

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi</b> .....	i-ii
● <b>ANCAMAN ISIS/IS DI INDONESIA</b> <i>oleh: Poltak Partogi Nainggolan</i> .....	177-199
● <b>DILEMA KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA</b> <i>oleh: Riyadi Santoso</i> .....	201-219
● <b>PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT</b> <i>oleh: Mohammad Mulyadi</i> .....	221-236
● <b>PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN</b> (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi) <i>oleh: Ahmad Subhan</i> .....	237-255
● <b>DAMPAK PARIWISATA TERHADAP LINGKUNGAN DI PULAU TIDUNG KEPULAUAN SERIBU</b> <i>oleh: Khrisnamurti, Heryanti Utami, Rahmat Darmawani</i> .....	257-273



## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Kajian Vol. 21, No. 3, September 2016 menyajikan lima tulisan ilmiah yang merupakan hasil seleksi dari sekian artikel yang masuk ke redaksi. Kelima tulisan ini merupakan hasil penelitian dan penggalian dari para penulis yang kemudian dianalisis dengan metode yang relevan sehingga layak untuk dibaca.

Tulisan pertama berjudul "*Ancaman ISIS/IS di Indonesia*" karya Poltak Partogi Nainggolan mengungkapkan tentang meluasnya pengaruh ISIS/IS dengan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional yang menimbulkan kekuatiran dan menuntut adanya kewaspadaan aparat keamanan di Indonesia. Menurut penulis, Indonesia selama ini merupakan wilayah yang potensial menjadi tempat aktivitas gerakan radikal keagamaan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan pendekatan deskriptis analitis yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara secara mendalam dengan sumber-sumber terpercaya. Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kota Palu serta Kabupaten Poso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi-aksi terorisme ISIS/IS di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2015, dan mulai meningkat intensitasnya dalam tahun 2016. Para pelaku, *modus operandi*, dan eksistensi mereka tidak dapat dilepaskan dari kelompok teroris internasional pro-Al-Qaeda. Tulisan ini menyimpulkan bahwa meskipun aksi-aksi terorisme belum sebesar di mancanegara, namun aparat keamanan Indonesia perlu meningkatkan kesiapan dan kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Penulis juga merekomendasikan perlunya kerja sama internasional dengan berbagai pihak terkait, karena ISIS/IS telah mengancam melalui berbagai jejaring internasional di Indonesia.

Tulisan kedua berjudul "*Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia*" karya Riyadi Santoso merupakan hasil penelitian studi kasus, yang menganalisis kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia selama tahun 2010-2015. Latar belakang penelitian adalah permasalahan dalam kebijakan pemerintah terkait pengendalian tembakau, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI, yang dilakukan peninjauan (*revisi*). Kerangka pikir penelitian kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek dan difokuskan pada penerimaan negara, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan, dengan pendekatan penelitian kualitatif dan kriteria kasus, yakni aktual, penting, informasi dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya benturan kepentingan yang sangat kuat antara pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga terjadi dilema dalam penentuan kebijakan PMK RI. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan untuk tujuan pengendalian tembakau dalam jangka pendek dan menengah, namun juga sangat penting tujuan pengendalian tembakau dalam jangka panjang. Pemerintah perlu mencari solusi alternatif penerimaan negara selain cukai hasil tembakau, mengingat Indonesia semakin maju secara ekonomi, pendidikan dan kesadaran kesehatan, dan di sisi lain juga berada dalam pergaulan internasional.

Tulisan ketiga berjudul "*Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat*" karya Mohammad Mulyadi merupakan tulisan yang cukup menarik dan relevan dengan kondisi saat ini. Tulisan ini merupakan kajian yang mendalam yang dilakukan penulis selama beberapa waktu, yang kemudian menghasilkan analisis yang cukup layak dijadikan referensi. Menurut penulis, pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat, karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan sosial sebagai sebuah upaya untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan perlu lebih ditonjolkan, karena di dalamnya terkandung dua aspek yakni (1) penentuan nasib sendiri di mana masyarakat dengan kategori miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya; dan (2) pemerintah hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap masyarakat. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan hal yang sama pentingnya, karena jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan penghasilan yang dimiliki diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka orang tidak akan miskin, dan jika tingkat pengangguran rendah maka tingkat kemiskinan juga akan rendah.

Tulisan keempat berjudul "*Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Daerah dalam Mendukung Transparansi Pemerintahan (Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi)*" karya Ahmad Subhan merupakan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif yang layak dibaca. Dalam tulisan ini penulis mengungkapkan bahwa walaupun sejak akhir tahun 2013 telah terbentuk Komisi Informasi Daerah Provinsi Jambi, namun masih banyak tantangan yang dihadapi lembaga ini. Salah satunya adalah problem internal

berupa dualisme kepemimpinan yang berpengaruh pada kinerja lembaga dan disharmoni hubungan dengan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada sudah memadai yaitu berupa Undang-Undang KIP dan berbagai peraturan pendukung lainnya. Dari aspek normatif dapat diketahui bahwa Komisi Informasi belum sepenuhnya menjalankan kewenangan dalam hal menyediakan dukungan kebijakan berupa kebijakan umum, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Sedang secara kognitif, sejauh ini masih belum terjalin persepsi yang sejalan dan koordinasi yang harmonis antara Komisi Informasi Provinsi dengan Pemerintah Daerah. Padahal kedua lembaga pelaksana KIP tersebut mestinya mampu berjalan seiring secara harmonis karena keduanya saling bergantung satu sama lain dalam hal kewenangan penganggaran dan penyelesaian sengketa.

Tulisan kelima berjudul "*Dampak Pariwisata terhadap Lingkungan di Pulau Tidung Kepulauan Seribu*" merupakan karya bersama tiga orang penulis yaitu Khrisnamurti, Heryanti Utami, dan Rahmat Darmawan. Tulisan ini cukup menarik untuk dibaca, karena isunya yang aktual hingga sekarang. Dengan pendekatan kualitatif penulis berupaya memberikan gambaran tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan. Menurut penulis, wisata bahari pada hakekatnya adalah bagaimana membentuk kesadaran akan kelestarian lingkungan berupa wilayah pesisir dan lautan baik untuk masa kini, esok maupun mendatang. Perkembangan Pulau Tidung sebagai tujuan wisata terlihat nyata dengan adanya banyak jasa yang dikelola baik secara individu maupun swasembada masyarakat seperti penginapan jenis *homestay*, penyewaan perahu, usaha catering dan lain-lain. Hal tersebut disamping berdampak positif secara ekonomi juga berdampak negatif dari segi lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan Pulau Tidung seperti tidak tertatanya lingkungan akibat pembangunan fisik, rusaknya terumbu karang akibat aktivitas wisatawan penyelam, dan sebagainya. Pada akhirnya temuan penelitian ini mengidentifikasi tiga dampak pariwisata terhadap lingkungan, yaitu: 1) Adanya perubahan visual di Pulau Tidung; 2) Adanya penumpukan sampah di pulau Tidung; 3) Adanya perubahan kualitas air yang ada di Pulau Tidung. Oleh karena itu, Pemerintah perlu membuat regulasi yang tepat agar kegiatan wisata di Pulau Tidung ramah lingkungan dan dapat menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

Demikian lima tulisan yang disajikan dalam Jurnal Kajian edisi kali ini, dengan harapan tulisan-tulisan tersebut dapat menjadi bacaan yang menarik dan sekaligus memperkaya pengetahuan pembaca. Redaksi juga berharap, tulisan-tulisan tersebut dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi inspirasi bagi karya ilmiah masa mendatang. Redaksi mengucapkan terimakasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan karya-karyanya, demikian pula kepada para mitra bestari yang telah memberikan banyak sumbangkan pemikiran selama proses penerbitan Jurnal Kajian edisi September ini.

Jakarta, September 2016

Redaksi

## **LEMBAR ABSTRAK**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

---

Poltak Partogi Nainggolan (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

### **ANCAMAN ISIS/IS DI INDONESIA**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, hlm. 177-199

Meluasnya dengan cepat pengaruh ISIS/IS dan aksi-aksi terorisme internasional mereka, telah menimbulkan kekhawatiran dan sekaligus kewaspadaan aparat keamanan untuk merespon serangan mereka di Indonesia. Sebagai wilayah perjuangan ISIS/IS di Asia Tenggara, Indonesia selama ini potensial dengan aktivitas gerakan radikal yang keagamaan dan aksi-aksi terorisme mereka. Penelitian deskriptis analitis ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara secara mendalam. Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah, terutama Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kota Palu dan Kabupaten Poso. Data-data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan menunjukkan aksi-aksi terorisme ISIS/IS di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2015, dan mulai meningkat intensitasnya dalam tahun 2016 ini. Para pelaku, *modus operandi*, dan eksistensi mereka tidak dapat dilepaskan dari kelompok teroris internasional pro-Al-Qaeda. Penulis berpendapat, walaupun aksi-aksi mereka belum sebesar di mancanegara, namun aparat keamanan Indonesia harus meningkatkan kesiapan dan kemampuan untuk dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara lebih efektif dan baik. Karena memberikan ancaman internasional dan bekerja dengan jejaring internasional, penulis merekomendasikan kerja sama internasional yang kuat untuk mengatasinya.

**Kata Kunci:** ISIS/IS, terorisme internasional, ancaman keamanan, Indonesia.

## **DILEMA KEBIJAKAN PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, hlm. 201-219

Tulisan ini hasil penelitian kebijakan pengendalian tembakau tahun 2010-2015 di Indonesia, yang dilatarbelakangi permasalahan dalam penentuan kebijakan pengendalian tembakau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK), melalui peninjauan kebijakan. Kajiannya mempertimbangkan berbagai aspek dan difokuskan pada penerimaan negara, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempertimbangkan kriteria kasusnya, yakni aktual, penting, informasi dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan terjadi benturan kepentingan yang sangat kuat antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga terjadi dilema dalam penentuan kebijakan PMK. Kajian ini menyimpulkan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam pengendalian tembakau untuk jangka pendek dan menengah, serta juga dalam pengendalian tembakau dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia juga perlu mencari solusi alternatif penerimaan negara selain cukai hasil tembakau mengingat negeri ini semakin maju secara ekonomi, pendidikan dan kesadaran kesehatan, dan di sisi lain tidak terlepas dengan pergaulan internasional.

**Kata Kunci:** kebijakan pengendalian tembakau, perlindungan masyarakat, penerimaan negara, kesehatan, ketenagakerjaan, Kemenkeu.



## **PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, hlm. 221-236

Pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat. Karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemberdayaan sosial sebagai sebuah upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan lebih ditonjolkan karena di dalamnya terkandung dua aspek yakni (1) penentuan nasib sendiri dimana masyarakat dengan kategori miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya; dan (2) pemerintah hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap masyarakat dengan status tersebut. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Karena jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga, jika tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi), tingkat kemiskinan juga rendah, begitupun sebaliknya.

**Kata kunci:** pengangguran, kemiskinan, peran pemerintah, pemberdayaan sosial.

**PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI DAERAH DALAM  
MENDUKUNG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN  
(Studi Kasus Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jambi)**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, hlm. 237-255

Sejak akhir tahun 2013 telah terbentuk Komisi Informasi Daerah Provinsi Jambi namun ternyata masih banyak tantangan yang dihadapi lembaga ini. Salah satu yang terjadi adanya problem internal yaitu dualisme kepemimpinan sehingga berpengaruh pada kinerja lembaga dan hubungan disharmoni dengan pemerintah daerah. Kajian ini membahas tentang penguatan kelembagaan Komisi Informasi di Provinsi Jambi dalam konteks implementasi keterbukaan informasi publik. Kajian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen peraturan, pemberitaan dan pelaporan. Analisis lebih mengedepankan pendekatan institusionalisme dari aspek regulatif, normatif dan kognitif agar lebih mampu menawarkan kerangka kebijakan yang bersifat legal-formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi sudah memadai bagi lembaga KI Provinsi Jambi dengan adanya UU KIP dan berbagai peraturan pendukung lainnya. Dari aspek normatif menunjukkan bahwa Komisi belum sepenuhnya menjalankan kewenangan dalam hal menyediakan dukungan kebijakan berupa kebijakan umum, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Secara kognitif, sejauh ini masih belum terjalin persepsi yang sejalan dan koordinasi yang harmonis antara Komisi Informasi Provinsi dengan Pemerintah Daerah. Kedua lembaga pelaksana KIP tersebut mestinya mampu berjalan seiring sejalan dan harmonis karena keduanya saling bergantung satu sama lain dalam hal kewenangan penganggaran dan penyelesaian sengketa.

**Kata kunci:** komisi informasi daerah, transparansi pemerintahan, keterbukaan informasi publik, KIP, provinsi Jambi.

## **DAMPAK PARIWISATA TERHADAP LINGKUNGAN DI PULAU TIDUNG KEPULAUAN SERIBU**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, hlm. 257-273

Wisata bahari pada hahekatnya adalah bagaimana membentuk kesadaran tentang bagaimana menentukan sikap dalam melestarikan wilayah lautan dan pesisir di masa kini dan mendatang yang mengacu kepada pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*), yang fokus untuk menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang dengan menerapkan prinsip layak secara ekonomi, lingkungan sosial, dan tepat guna secara teknologi. Perkembangan Pulau Tidung sebagai salah satu tujuan wisata khususnya wisata bahari telah berkembang secara signifikan dan *sporadic*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya amenities pariwisata yang dikelola secara individu maupun swasembada seperti penginapan jenis *homestay*, penyewaan perahu, usaha katering dan lain-lain. Hal tersebut berdampak positif secara ekonomi tetapi juga berdampak negatif dari segi lingkungan yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan Pulau Tidung, seperti tidak tertatanya lingkungan akibat banyaknya pembangunan di kawasan Pariwisata, rusaknya terumbu karang karena aktivitas wisatawan penyelam, semakin sedikitnya sumberdaya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas wisata di pulau tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang analisisnya terkait dengan perubahan lingkungan alam yang terjadi di Pulau Tidung akibat aktivitas pariwisata. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga dampak. Pertama, adanya perubahan visual di Pulau Tidung. Kedua, adanya penumpukan sampah di Pulau Tidung. Ketiga, menyangkut perubahan kualitas air yang ada di Pulau Tidung serta perubahan lingkungan perairan khususnya terumbu karang yang diakibatkan karena tingginya aktivitas pariwisata seperti *snorkeling* yang dilakukan secara masal. Untuk itu, dibutuhkan peran Pemerintah yang senantiasa membuat regulasi yang tepat khususnya dalam pembangunan pariwisata di wilayah Pulau Tidung seperti pembangunan akomodasi jenis *homestay*, kegiatan wisata dan pengelolaan sampah dan air bersih agar pariwisata di Pulau Tidung serta tata kelola kegiatan wisata yang ramah lingkungan dan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** pariwisata, wisata bahari, dampak pariwisata, dampak lingkungan, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu.



## **LEMBAR ABSTRAK**

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

---

Poltak Partogi Nainggolan (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

### ***ISIS/IS THREATS IN INDONESIA***

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, p. 177-199

*The fast increasing spread of ISIS/IS influence and its international terrorist activities have raised fear, alarming security forces anticipation on its terror plan. ISIS/IS have determined Indonesia as its Southeast Asia Caliphate, currently been identified as safe haven for radical religious groups. This descriptive-analytical research was conducted by combining literature studies and in-depth interviews in its data gathering. Field researches were carried out in Talaud and Palu/Poso, and data analysis was employed qualitative method. Research finding shows that ISIS/IS terror activities have begun in 2015 and tended to intensify in 2016. Its modus operandi is actually a continuity of and follows its predecessor, Al-Qaeda. The writer argues that although ISIS/IS terror activities in Indonesia are still smaller in its scale than in Europe, security forces in Indonesia needs to improve its readiness and capability in more effectively preventing and handling the terrorist threats. Because it creates international threats and works with global networks, the writer recommends stronger cooperations among countries to respond those challenges.*

**Keywords:** *ISIS/IS, international terrorism, security threat, Indonesia.*

---

Riyadi Santoso (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**TOBACCO CONTROL POLICY DILEMMA IN INDONESIA**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, p. 201-219

*This article is research results on tobacco control policy during 2010-2015 in Indonesia. Its background is tobacco control policy introduced by the Indonesian government through the Ministry of Finance Provision (PMK) which must be revised every year. This policy becomes dilemmatic since it has various-aspects dealing with state income, public health, and issues of employment. Its research applies a qualitative method, and considers various aspects, consisting its actuality, urgency, and verification. The research concludes that there is strong conflict of interest among stakeholders which produces serious dilemma on PMK's decisions. Therefore, the government should balance its tobacco control goal in short and middle time periods, while it becomes more importance in long-time tobacco control. The government needs also alternative solution for state income from tobacco taxation, in addition to its interests in advancing its economy, education, and health sectors amidst its existence in international arena.*

**Keywords:** tobacco control, state revenue, health, employment, Finance Ministry.

**THE ROLE OF GOVERNMENT IN OVERCOMING UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN SOCIETY**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, p. 221-236

*Unemployment and poverty has a strong relationship in society. Due to the rising unemployment, the level of poverty in this country will consequently increase. Government authorities as policy holder can hopefully play an effective role in addressing the problem of unemployment and poverty. The purpose of this study is to identify and explain the role of government in addressing unemployment and poverty in the community. This study shows that social empowerment introduced by the government plays important role in addressing the problem of unemployment, and poverty more highlighted since it contains two aspects: (1) self-determination, in which people with poor category is free to determine the problem-solving solutions; and (2) the government is only a facilitator while the culprit remains the community with that status. Further, efforts to lower the unemployment rate and the poverty rate is equally important because if people are unemployed does not mean having a job and income, and income owned of work is expected to meet the necessities of life. While, if the needs are met, they will not be poor. Therefore, the low unemployment rate (higher employment) means the poverty rate is also low, and vice versa.*

**Keywords:** *Unemployment, poverty, government role, social empowerment.*

**INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE LOCAL INFORMATION COMMISSION  
TO SUPPORT GOVERNMENT TRANSPARENCY  
(Case Study of Public Information Disclosure in Jambi Province)**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, p. 237-255

*Since 2013, Jambi province has formed The Local Information Commission but there are still many challenges and obstacles faced by this institution. One of their internal problems is dualism of leadership which produced bad impact on the agency's performance. This study discusses institutional strengthening in relation with public disclosure implementation. The study employs a qualitative descriptive method. Primary data was collected through interviews, while secondary data is obtained through document and reports tracking. Its analysis emphasizes institutional approach from the perspectives of regulative, normative and cognitive aspects. The results, mainly using Freedom of Information Law and other supporting regulations, show that regulative aspect was sufficient for this institution. Normative aspects also indicate that the institution has not fully run its authorities in providing policy support in form of implementation guidelines and instructions. Further, it has not still established a perception that has consistency and harmony with the Commission and Local Government. Both the public disclosure implementing agencies, therefore, should be able to work hand in hand in fields of budgeting and dispute settlement authority.*

**Keywords:** local information commission, government transparency, public information disclosure, KPI, Jambi province.



**THE IMPACTS OF TOURISM ON THE ENVIRONMENT IN TIDUNG OF THOUSAND ISLANDS**

Kajian Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, p. 257-273

*Marine tourism is basically to create an awareness to determine the behavior of tourists in preserving areas of the oceans and coastal areas in the present and future in relation with sustainable tourism. It focuses on organizing tourism activities in a responsible manner without sacrificing the potential of fulfilling the needs and aspirations humans in the future by applying the principle of viable economic, social environment, and appropriate technology. Tidung development as a tourist destination has grown significantly and sporadic, which is shown by the increasing number of tourism amenities that is managed by individuals or groups such as homestay accommodation, boat rental, catering business and others. This development pushes positive impacts in economy, while on the other creates negative impacts on the environment that could cause environmental degradation such as unorganized development within the area, destruction of coral reefs due to tourist activity while snorkeling, etc. This research aims to examine the extent of environmental damage caused by tourist activities on the island. It uses a qualitative approach that analyzes relations that changes environment in Tidung Island due to tourism activities. The results of this research identify three impacts caused by tourism. The first impact is the change of visual appearance; the second is the fast accumulating of garbage in the Tidung Island, and the third is the impacts of changes of water quality and destruction of coral reef around the area caused by tourism activities, i.e. snorkeling. Therefore, the local government should play a crucial role in implementing sustainable tourism in Tidung Island.*

**Keywords:** *tourism, marine tourism, tourism impact, environmental impacts, Tidung, Seribu Islands.*